

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi sistem Pemerintahannya berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang semuanya memiliki ciri melibatkan Masyarakat, perencanaan maupun partisipasi politik diantaranya dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades), aspek penting dalam Demokrasi yaitu adanya partisipasi Masyarakat untuk ikut serta memilih atau menyalurkan haknya dan ikut berpartisipasi berlomba-lomba untuk mencalonkan dirinya sebagai calon kandidat Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk pesta Demokrasi yang diselenggarakan setiap 6 tahun sekali, seorang Kepala Desa memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa¹. Pada tanggal 1 Oktober 2017 Kabupaten Demak menyelenggarakan pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang diikuti 54 Desa di Kabupaten Demak salah satunya Desa Bungo Kecamatan Wedung, telah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 39 tentang Desa, kepala desa menjabat selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut². Peraturan pelaksanaan

¹ Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Yogyakarta: PN Balai Pustaka

² Pasal 39 masa jabatan Kepala desa 6 (enam) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan

Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memperoleh pemimpin desa yang bertanggungjawab dan dapat mengayomi Masyarakat Desa. Adapun ketentuan atau syarat-syarat untuk calon kepala desa yang harus dipenuhi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting untuk mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa begitupun unsur masyarakat Desa seperti Karang Taruna, LKMD, PKK, dan Tokoh Masyarakat Desa setempat ikut berperan penting juga dalam menyukseskan jalannya Pemilihan Kepala Desa.

Perkembangan sistem politik dan demokrasi dipedesaan sudah dapat menunjukkan kemajuan yang dapat dilihat dari antusias masyarakat setempat untuk ikut serta dalam melancarkan jalannya Pemilihan Kepala Desa, dimulai dari pendaftaran sampai saat hari pencoblosan, warga Masyarakat Desa dengan senang hati menyambut pesta Demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa tersebut dengan berbagai bentuk perilaku dan sikap yang berbeda-beda, dari masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk menjadi calon Kepala Desa hingga mendukung calon yang nantinya akan menjadi Kepala Desa, disisi lain dengan adanya Pemilihan Kepala Desa ada juga masyarakat yang tidak berpartisipasi menyalurkan haknya dalam pencoblosan Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini Partisipasi Masyarakat dapat dilihat dari perilaku Masyarakat untuk menggunakan haknya untuk memilih karena Masyarakat memiliki kepentingan masing-masing.

Proses Pemilihan Kepala Desa tidak lepas bahkan tidak jauh dari *Money Politics* atau sering kali dikenal dengan Politik Uang yang merupakan bentuk pemberian uang atau barang yang digunakan untuk memperkuat dalam memberikan janji-janji untuk menyuap supaya orang tersebut memberikan hak

pilihnya untuk kandidat yang sudah memberikan uang tersebut dalam pemilihan kepala desa. Upaya untuk memperoleh kekuasaan dibidang politik dengan menjadikan uang sebagai materi perantara kekuatan.³ Terutama pada Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak heran lagi bahwa politik uang sekarang menjadi budaya dan strategi calon Kepala Desa untuk menjadikan kekuatan seseorang agar memilihnya, dalam UU No. 1 pasal 73 ayat (1) tahun 2015 yaitu calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih⁴. pada Undang-Undang No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 dijelaskan bahwa siapa pun pada diselenggarannya pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, baik orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) Tahun, Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu⁵. Tahap terpenting dalam proses Pilkades bagi setiap kandidat adalah masa kampanye. Pada masa kampanye setiap kandidat berusaha untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih untuk mendukung mereka dan memberikan suara pada saat pelaksanaan⁶. Dapat kita lihat dari kampanye Pilkades saat ini uang bukanlah rahasia lagi, banyak orang

³ Ika setia rini dan Rr Nanik Setyowati *"makna money politics pada masyarakat kelas menengah bawah"* hal 109-126

⁴ Pasal 73 (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

⁵ Pasal 73 (3) Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

⁶ Zerunisa, Rizki. (2014). Political marketing kandidat dalam pemilihan Kepala desa (pilkades). (studi kasus pilkades Desa gentan kecamatan gantiwarno kabupaten Klaten).

memberikan uang tanpa sembunyi-sembunyi, malah uang sekarang menjadi budaya pada saat kampanye uang dibagikan kepada Masyarakat untuk mempengaruhinya dalam memberikan suaranya untuk kandidat tersebut, bukan hanya Pemilihan Kepala Desa saja banyak Pemilu, dan Pilkada juga menggunakan politik uang untuk dijadikan pengaruh pada masyarakat agar hak suara mereka diberikan kepada kandidat tersebut.

Di Desa Bungo sendiri banyak Masyarakat yang antusias ikut berpartisipasi untuk mendaftarkan dirinya dalam pencalonan kepala desa, dari banyaknya masyarakat yang mendaftar tentu mempunyai kepentingan masing-masing. Disisi lain Desa Bungo adalah Desa yang mempunyai luas wilayah secara keseluruhannya kurang lebih 795,8 Ha yang terdiri dari area pemukiman, sawah, pekarangan dan lainnya, luas tanah sawah di Desa Bungo lebih luas daripada dengan luas tanah lainnya, Desa Bungo sendiri dapat dikatakan sebagai desa yang kaya akan *Tanah Bondo deso* meliputi bengkok (tanah sawah) secara keseluruhan sekitar 215 bahu, dari bengkok tersebut kepala desa beserta perangkat desa mendapatkan kesempatan untuk mengelola bengkok itu selama menjadi kepala desa dan perangkatnya sampai jabatannya selesai, pembagian bengkok sendiri Kepala Desa mendapat bagian 25 bahu untuk dipinjamkan dan dikelolanya⁷. Mungkin dengan alasan itulah menjadikan masyarakat antusias untuk bisa mencalonkan dirinya sebagai kepala desa, karena bagi mereka dengan adanya bagian pinjaman sawah bengkok tersebut menjadi keuntungan tersendiri. Disisi lain tidak mudah untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa karena dalam

⁷ Data Kantor Desa Bungo

pencalonan Kepala Desa di Desa Bungo sangatlah ketat dalam hal uang, seseorang yang mencalonkan sebagai Kepala Desa berani mengeluarkan banyak uang untuk pencalonannya uang tersebut bukan untuk pendaftaran melainkan untuk kepentingan masing-masing salah satunya uang untuk mempengaruhi seseorang agar mereka menjadi tim suksesnya atau disebut dengan Politik Uang. Jadi dalam pencalonan perangkat desa seseorang yang pandai akan tersingkirkan dengan seseorang yang punya banyak uang, mengapa demikian karena bagi mereka uang menjadikan salah satu jurus untuk mencapai tujuannya.

Pada hari Minggu 1 Oktober 2017 Desa Bungo mengadakan Pemilihan Kepala Desa terdapat 4 (empat) calon kandidat yang mendaftar yaitu:

1. Imam Wahyudi, S.E
2. Zakaria Hidayat
3. BJ Nugrogo, S.Sos.MM
4. Slamet, S.Sos.I⁸

Dengan berjalannya waktu 4 (empat) kandidat tersebut mengadakan kampanye yang dibantu oleh tim sukses masing-masing untuk menjalankan visi dan misinya untuk mensukseskan jalannya kampanye salah satunya dengan memberikan uang atau barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka memberikan hak pilihnya untuk kandidat yang memberikan uang tersebut. Karena sudah tidak asing lagi bahkan sudah menjadi budaya setiap adanya pemilu strategi itu yang banyak dipilih oleh kandidat yang mencalon

⁸ Data Pemilihan kepala desa Tahun 2017

mereka memberikan uangnya sudah tidak lagi dengan sembunyi-sembunyi melainkan secara terang-terangan melakukannya dan tidak kenal waktu pagi, siang dan malam tim sukses akan kerumah rumah masyarakat yang mereka yakini dan akan diberikan uang sebagai imbalan untuk memberikan hak pilihnya untuk memilih kandidat yang memberikan uangnya. Sebelum memberikan uang kepada masyarakat biasanya kandidat dan tim suksesnya mengadakan rapat dalam rapat itu salah satunya membahas tentang strategi yang akan ia lakukan. Terdapat 4 calon Kepala Desa yaitu:

1. Imam Wahyudi S.E untuk mengikuti pencalonan kepala desa menghabiskan uang kurang lebih Rp. 600 Juta (600.000.000).
2. Zakaria Hidayat menghabiskan uang untuk pencalonan kepala desa kurang lebih Rp. 400 Juta (400.000.000).
3. BJ Nugroho. S.Sos.MM menghabiskan uang untuk pencalonan kepala desa sekitar kurang lebih Rp. 100 Juta (100.000.000) dan
4. Slamet S.Sos.I menghabiskan uang untuk pencalonan kepala desa sekitar kurang lebih Rp. 900 Juta (900.000.000). dapat dilihat dari pengeluaran untuk pencalonan kepala desa tidaklah sedikit memerlukan uang banyak untuk mencapai tujuan dari masing masing calon kandidat.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan kepala Desa Bungo Tahun 2017 Jumlah yang mempunyai hak pilih yaitu 4.910 orang, Jumlah yang hadir menggunakan hak pilih yaitu 4.323 orang, jumlah suara yang tidak sah yaitu 44 orang dan jumlah yang tidak menggunakan hak

pilihnya yaitu 543 orang ⁹.

Tabel I.I
Jumlah Suara dan Presentase Pemilihan Kepala Desa Bungo Tahun 2017

No	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara Sah	Presentase
1	Imam Wahyudi, S.E	1.342	32%
2	Zakaria Hidayat	943	22%
3	BJ Nugrogo, S.Sos.MM	374	8%
4	Slamet, S.Sos.I	1.620	38%
Total		4.279	100%

Sumber: Data Pemilihan Kepala Desa Bungo Tahun 2017

Dilihat dari tabel diatas, dari keempat calon tersebut hasilnya menunjukan bahwa bapak Slamet,S.Sos.I memperoleh suara terbanyak 1.342 suara. Hal tersebut tidak lepas dengan banyaknya uang yang dikeluarkan dan jumlah perolehan suara yang dimiliki setiap kandidat dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang dikeluarkan masing-masing calon Kepala Desa sangat berpengaruh dalam perolehan suara, semakin banyak uang yang dikeluarkan semakin banyak pula suara yang didapatkan dan semakin sedikit uang yang dikeluarkan sedikit juga suara yang didapatkan.

⁹ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2017 di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis lebih dalam faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sehubungan dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada saat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa (pilkades), agar masyarakat tahu bagaimana ia menyikapi dan apa yang harus dilakukan pada saat pemilihan kepala desa tiba khususnya pada saat kampanye Pilkades.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Sehubungan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pengetahuan, dan pemahaman bagi pemerintah daerah maupun masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih pada Pemilihan Kepala Desa.

- 2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan pentingnya menyikapi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (pilkades) supaya tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming yang diberikan

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan kembali tentang hasil-hasil penelitian yang sebelumnya sudah diteliti dengan maksud biar terhindar dari duplikasi dan sebagai pembuktian bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam konteks yang sama dengan penelitian tersebut. Tinjauan pustaka bertujuan untuk meninjau kembali tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian-penelitian politik uang. Penelitian ini menggunakan sumber yang ada sebagai acuan dalam pembandingan, menurut tinjauan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik politik uang bisa terjadi dan faktor yang menjadikan kandidat calon kepala desa melakukan politik uang dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Dapaun penelitian-penelitian yang sebelumnya telah ada dan dilakukan yang berhubungan dengan politik uang. Berikut ini terdapat penelitian terdahulu yang digunakan untuk referensi penelitian ini diantaranya:

Tabel I.2
Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti (Tahun penelitian)	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Mohamad Amanu	Politik uang dalam pemilihan kepala desa (studi kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)	Pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian itu peneliti mempergunakan teknik purposive serta Snowball disertai penentuan terhadap informan yang didasari oleh kebutuhan data dan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta observasi dengan menggunakan teori Anthony giddens. Pada penelitian tersebut didapati jika praktik politik uang pemilihan kades dilaksanakan dari expert agent serta selain timses melalui kampanye berupa uang, barang dan janji-janji
2	Halili	Praktik Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura	pada penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan naturalistik, dengan menggunakan subjek dengan teknik purposive berupa paper. Hasil penelitian menunjukan terdapat

			actor politik yaitu pelaku langsung dan tidak langsung, dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disyalir sebagai pendukung kandidat calon kepala desa dan adanya tim sukses untuk membagikan uang ke masyarakat. Praktik politik yang ekstensif meningkatkan partisipasi formal pemilih

Pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian diatas yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi dan penelitian ini berfokus pada politik uang yang terjadi di Desa Bungo sehingga dalam penelitian ini sangat menarik diteliti karena proses Pilkades sangat berpengaruh pada masyarakat yang disebabkan oleh politik uang.

Menariknya dalam penelitian ini tidak hanya satu calon melainkan semua calon Kepala Desa menggunakan politik uang banyaknya uang yang dikeluarkan calon Kepala Desa untuk dibagikan ke masyarakat sangat mempengaruhi suara yang didapatkan secara berurutan sesuai banyak dan sedikitnya uang yang dikeluarkan untuk mempengaruhi pemilih

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pemilihan Kepala Desa atau sering disebut Pilkades merupakan suatu Pemilihan Kepala Desa yang secara langsung dipilih oleh masyarakat atau warga setempat yang merupakan masyarakat desa tersebut. Pilkades dilaksanakan 6 tahun sekali, pilkades sendiri dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa. Pilkades telah dilaksanakan pada berbagai tempat di negara Indonesia agar dapat terwujudnya sistem demokrasi dengan sebaik-baiknya dalam penataan pemerintah kedepannya supaya menciptakan kemakmuran untuk masyarakat secara umum sebagaimana landasan yang diterapkan dalam berdemokrasi.¹⁰ Sebagai landasan pokok pikiran aturan dari pemerintah desa yaitu keberagaman, kontribusi, otonomi, demokratisasi serta memberdayakan warga desa (Tim Lopera, 2001, hal. 30). Desa merupakan sebuah daerah yang dihuni banyak keluarga dan menjadi di suatu lingkup masyarakat terdiri atas warga hukum yang berorganisasi pemerintahan paling rendah berada pada naungan camat serta memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sebagai bagian dari NKRI. Pada penyelenggaraan pemerintahan, desa berhak menetapkan aturan serta kepengurusan kepentingan pemerintah desa otonom dan warga desa. Karena ada pembagian yang jelas yaitu pemerintahan desa meliputi Kades beserta perangkatnya, badan perwakilan desa atau parlemen desa, sehingga terdapat suatu pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif (Ari Dwipayana, 2000:102).

¹⁰ Hidajat Imam. 2009. Teori-Teori politik. Malang: Setara press. Hlm 86

perubahan yang cukup penting dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, khususnya dalam pemerintahan desa adalah mengenai struktur pemerintahan desa yaitu telah terjadi pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif desa (Kepala Desa) dan legislatif desa (Badan Perwakilan Desa). Eksekutif desa tidak menjadi pusat dari kebijakan melainkan hanya sebagai pelaksana kebijakan yang akan dikontrol oleh Legislatif Desa. Disamping itu juga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui legislatif Desa kepada Eksekutif Desa. Ketentuan larangan dan sanksi di atas menunjukkan perlunya partisipasi masyarakat secara murni yang diarahkan pada pemilihan Kepala Desa. Pemberian apapun terhadap pemilih merupakan Jurnal Desentralisasi Vol. 7 No. 4 tahun 2006 30 bentuk mobilisasi yang merusak legitimasi kepemimpinan yang terpilih. Dengan demikian satu hal penting yang dimuat dalam ketentuan itu adalah Penolakan terhadap praktik penghamburan uang dalam proses pemilihan kepala desa. Penghamburan uang dapat ditafsirkan sebagai politik uang (money politics) yang tidak kondusif bagi pematangan demokrasi procedural dalam proses transisi politik di pedesaan (Solahuddin dkk, 2002, hal. 39). Tahapan memilih Kades pada era otonom daerah dengan cara diimplementasikan didasari terhadap struktur dan kultur warga desa yang saling berinteraksi pada aspek secara teknis serta substansi dan saling menarik kepentingan tiap-tiap perangkat desa.¹¹

¹¹ Muis Abdul. (2019). Pemilihan kepala desa sebagai acuan empiris pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (ditinjau dari perspektif historis). <http://samarinda.lan.go.id/jd/index.php/jd/article/download/496/287/> Di unduh tanggal 5 Juni 2020.

1.5.2.2 Politik Uang (*Money Politics*)

Politik uang atau *money politics* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang sogok.¹² Politik uang yaitu uang yang dipertukarkan dengan kedudukan ataupun putusan politik di atas namakan oleh kepentingan publik namun pada dasarnya hanya untuk kepentingan individu ataupun sekelompok partai.

Berdasarkan pemaparan dari Aspinall patronase yaitu suatu bagi hasil dari politisi serta pendistribusian dengan cara personal terhadap pemilih karyawan ataupun orang-orang yang giat dalam pelaksanaan kampanye bertujuan yaitu memperoleh dukungan secara politik. Politik uang berupaya untuk memberikan pengaruh terhadap individu lainnya ataupun warga disertai imbalan berupa uang maupun barang tertentu atau yang sering juga disebut jual beli suara dengan memberikan uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya. Aspinall melakukan elaborasi terhadap patronase serta klientelisme yang berbeda. Patronase mengacu terhadap bahan materi ataupun untung lainnya yang dilakukan distribusi dari politisi terhadap pihak yang memilih ataupun mendukung. Sementara klientelisme mengacu dengan sifat relasi kuasa yang personal serta untung materi yang ditukarkan dengan pendukung politik.

Berdasarkan pemaparan dari Aspinall dan Sukmajati bahwa politik

¹² Departemen pendidikan dan kebudayaan *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1994)

uang adalah usaha melakukan penyuapan terhadap pemilih melalui pemberian materi ataupun layanan supaya preferensi suaranya bisa diberi pada seseorang penyuap¹³. Hal tersebut dapat dialami pada lingkup yang cukup luas mulai dari pemilihan kades sampai pemilihan umum yang berada pada sebuah negara.¹⁴ Hampir pada saat pemilihan dari tingkat Pemilihan Kepala Desa hingga Pilkada, Pileg (pemilu Legislatif), Pilpres menggunakan uang, sebagian uang sebagai strategi untuk mempengaruhi masyarakat agar sesuai dengan tujuannya.

Perilaku politik uang mampu menghasilkan suatu peristiwa patronase dan klientelisme. Klientelisme merupakan penukaran yang bersifat individual bercirikan terdapat kewajiban maupun interaksi kekuasaan yang dialami disertai ketidakseimbangan diantaranya. Di samping hal tersebut, bersamaan oleh tanda-tanda kegiatan patron yang mempersiapkan klien untuk mengakses berbagai fasilitas. Dengan demikian dibentuklah pola interaksi tukar-menukar yang bersifat timbal balik dan membawa keuntungan satu sama lain. (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019).

Jadi dapat dikatakan politik uang adalah tindakan di sengaja dan secara sadar dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk memberikan ke seseorang atau masyarakat berwujud uang, barang ataupun yang lainnya, dengan tujuan supaya masyarakat memberikan hak pilihnya untuk

¹³ ibid

¹⁴ Indra Ismawan, 1999, Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm.5.

orang yang sudah menyuapnya. Selain patronase ada juga *vote buying*. Menurut Aspinall “*vote buying* merupakan pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seseorang individu ataupun keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara atau beberapa hari sebelumnya” (Aspinall 2015). Jadi politik uang itu bertujuan untuk mengalihkan simpati masyarakat atau pemilih agar mereka memberikan haknya untuk mereka. Pemberian uang merupakan bentuk strategi politik patronase paling banyak praktikkan pada para calon kandidat. Bahwa ada beragam praktik politik uang yang dilakukan diantaranya ada yang secara halus sehingga seseorang atau masyarakat yang menerima uang tersebut tidak sadar akan uang yang diberikannya itu sebagai sogokan agar dia memilihnya dan ada yang secara terang-terangan ini yang akhir-akhir ini banyak yang dilakukan oleh calon kepala desa memberikan uang secara terang-terangan di depan banyak orang dan tidak mengenal waktu pagi, siang ataupun malam.

1.5.2.3 Perilaku Pemilih

Ketika pemilu dilangsungkan adanya sejumlah tingkah laku dari pihak yang memilih mengambil peran esensial misalnya membagi pilihan pada berbagai partai cara bersikap yang ditunjukkan masyarakat kurang memiliki kepedulian, berpindah pemilih, tingkah laku pemilih yang tetap pendirian, dan musiman beragam alasan dalam penentuan pilihan adalah

berbagai perihal yang terdapat pada pemilu.¹⁵ Salah satu bentuk perilaku politik adalah perilaku pemilih yang dapat dilihat pada proses pemilihan umum yaitu perilaku yang merupakan langkah setiap orang untuk memutuskan untuk berpartisipasi atau ingin memilih. Menurut Lomasky pada analisis Ramlan Surbakti jika keputusan dalam menentukan pilihan yang dialami pada saat Pemilu dilangsungkan adalah tingkah laku secara ekspansif atau dialami pada waktu-waktu yang tertentu.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa banyaknya pemilih hampir sama dengan saat kita mendukung, banyaknya pemilih yang perilaku cenderung termanifestasi pada satu poin. Tinggi rendahnya partisipasi perilaku pemilih dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pemilihan kepala desa.

Secara umum teori mengenai perilaku pemilih dalam menentukan sebuah pilihan menurut teori Afan Gaffar digolongkan menjadi dua pendekatan yaitu *Mazhab Colombia* dan *Mazhab Michiga*. Mazhab Colombia memfokuskan terhadap pengaruh secara sosiologis untuk pembentukan tingkah laku warga pada penentuan pilihannya pada saat pemilihan umum dilangsungkan. Pada model tersebut masyarakat menjadi suatu kelompok yang memiliki sifat vertikal melalui bawah sampai dengan ke atas. Dalam pendekatan jenis ini dipercayai jika warga tersusun atas beragam norma mendasar secara sosial dan dikelompokkan berdasarkan sosiologis misalnya kelas sosial, agama, umur, pekerjaan hal itu yang bisa mempengaruhi dalam perilaku memilih, Sedangkan Mahzab Michiga

¹⁵ Peter Schroder, *Strategi Politik* (Jakarta: Nomos, Banden-Banden, 2000), 120

¹⁶ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 1999), H. 106

memfokuskan pada faktor psikologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya pada saat pemilihan umum. Pemilih menjadi pihak atau individu yang menjadi tujuan utama untuk mempengaruhi dan meyakinkan meraga supaya mendukung dan memilih anggota politik yang bersangkutan didalamnya.

Dalam perilaku pemilih dianalisis menjadi tiga model pendekatan perilaku yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis sosial dan pendekatan rasional.

1. Pendekatan sosiologis

Model pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Kongretnya, pilihan seseorang dalam memilih pada pemilihan umum dapat dipengaruhi dari latar belakang demografi dan sosial ekonomi seseorang seperti jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendapatan, kelas dan agama.¹⁷ Hal ini dapat dilihat perilaku dengan instrumen seperti status sosial ekonomi, agama, etnik dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan masyarakat atau pemilih cenderung memilih seseorang yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang tinggi. Latar belakang inilah yang menjadi pendorong seseorang untuk memilihnya.

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 145

2. Pendekatan psikologis sosial

Pendekatan psikologis sosial digunakan dan dikembangkan untuk menjelaskan perilaku. Berdasarkan pendekatan ini, terlihat bahwa mereka memiliki cukup informasi dan mempunyai keyakinan bahwa pilihan mereka bermakna dan dapat membantu memperbaiki keadaan. Pendekatan ini juga merupakan psikologis dalam diri sendiri akibat proses sosialisasi politik menyangkut orientasi identifikasi partai, isu dan kandidat.¹⁸

3. Pendekatan rasional

Pendekatan rasional memandang aktivitas pemilihan menjadi suatu produk kalkulasi yang memiliki keuntungan dan kerugian disertai pertimbangan bukan sekadar biaya pemilihan maupun memungkinkan suara memberikan pengaruh terhadap hasilnya, namun turut terdapat opsi yang berbeda ada dalam pilihan tersebut. Perihal ini dipergunakan pemilih kandidat yang berkeinginan untuk mengajukan diri agar dipilih menjadi pejabat pemerintahan. Untuk seseorang yang memilih mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, dipergunakan dalam pengambilan keputusan tentang partai ataupun kandidat

¹⁸ Fahmi, M. H. (2019). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Pada Pilpres 2019. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.

yang menjadi pilihan khususnya dalam pembuatan keputusan jika turut serta menentukan pilihan ataupun tidak memilih¹⁹.

Dalam pilihan rasional, warga negara berperilaku dengan rasional. Yaitu dengan menghitung bagaimana ia mendapatkan hasil terbesar dengan biaya paling murah. Jika warga negara ingin mendapatkan hasil yang sama dalam pemilihan umum, terlepas dari berpartisipasi ikut atau tidaknya dalam pemilihan umum, maka warga negara tersebut tidak harus ikut berpartisipasi pemilu. Dalam perspektif pilihan rasional atau ekonomi hasil dalam pemilihan umum tanpa perlu keluar ongkos²⁰

1.6 Metoda Penelitian

Metode Penelitian Merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan membutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sugiyono,2016:1)²¹

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 146

²⁰ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat; Analisis Tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden di Indonesia Pasca Orde Baru*, 29

²¹ Metode Penelitian. <http://repository.unpas.ac.id/30310/6/BAB%20III.pdf> diunduh pada tanggal 16 Oktober 2019

1.6.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran suatu objek dan memperoleh data yang faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penelitian deskriptif lebih kepada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta dan kenyataan yang benar-benar terjadi dilapangan. Penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian ini menekankan pada quality atau hal terpenting pada barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial²²

1.6.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan pada di slenggarakannya Pemilihan Kepala Desa yaitu di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang individu atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat memberikan informasi apa yang diketahuinya tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang akan diteliti. Jadi orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data sesuai masalah yang diteliti itu dapat membantu peneliti mendapatkan

²² M.Djunaidi Ghony. Penelitian kualitatif.(Yogyakarta:Ar-Ruzz media.2012) Hlm 25

obyek atau informasi yang akan ditelitinya. Adapun subjek/narasumber yang akan membantu peneliti untuk menggali informasi adalah masyarakat dan pihak yang terkait dalam politik uang dan pihak yang menerima lebih dari satu politik uang dari calon Kepala Desa, sedangkan objek adalah uang yang diterima pemilih yang di berikan para calon Kepala Desa untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa Bungo Tahun 2017

1.6.4 Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan berupa data kualitatif yang berbentuk:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi dengan cara tanya jawab dengan informan yang sedang diwawancarai baik secara individu maupun kelompok untuk memperoleh jawaban.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini informan memperoleh informasi dapat melalui fakta yang ada dalam jurnal, buku, tabloid, internet, media sosial, media cetak yang didalamnya terdapat informasi penting untuk kita ketahui.

1.6.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber

atau subyek yang diteliti. Seperti wawancara dan dokumentasi disini peneliti memperoleh data langsung dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Riyanti S.Pd, M.Pd

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jadi data yang diperoleh bisa dari studi pustaka, membaca, memahami dan mempelajari melalui media lain yang bersumber pada buku, literature, koran dan dokumen ataupun media internet yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari data sekunder ini berguna untuk mendukung data primer .

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pertama dalam penelitian, Untuk memperoleh data, dan informasi yang detail, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara²³. Metode ini proses komunikasi untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi dengan cara Tanya jawab dengan informan yang sedang diwawancarai baik secara individu

²³ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. VII (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm.126

maupun kelompok dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan jawaban yang sedang ditanyakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang- barang yang tertulis²⁴. Selain melalui wawancara informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk jurnal, dokumen, buku, arsip, media sosial, media cetak, internet dan lainnya yang didalamnya terdapat informasi-informasi penting. Dan pengambilan gambar untuk memperkuat hasil penelitian.

1.6.7 Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis dan interpretasi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai selesai sesuai data-data yang sudah ada, adapun tahapannya yaitu:

1. Penyajian data

Menyiapkan data untuk dianalisis dan menyusun data sesuai jenisnya, dalam penyajian data tersebut didalamnya berkaitan dengan politik uang dalam pemilihan kepala desa

2. Verifikasi

Tahapan ini merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses. Sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan

²⁴ Sutrisna Hadi, *Metodelogi Research II*, (Yogyakarta: Yasbit Fak Psikologi UGM, 1989), hlm. 152

masalah, walaupun nantinya dimungkinkan akan terjadi perubahan dan perkembangan jika bukti-bukti dan konsekuensi dari perundingan bipartit tidak didukung dengan data yang kuat²⁵

1.6.8 Kualitas Data

Keabsahan data agar bisa dipercaya, didapat menggunakan cara Triangulasi Sumber (Sugiyono, 2009: 274-275), kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari informan yang kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan mengenai persamaan, perbedaan dan bagian mana yang spesifik dari sumber informasi tersebut. Kemudian penggunaan bahan referensi, sebagai pendukung peneliti ketika mengumpulkan data dari informan dengan menggunakan alat bantu berupa kamera untuk mengambil gambar dan perekam suara sebagai bukti wawancara²⁶

²⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

²⁶ *Ibid*